KOTA MATARAM

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA MATARAM
TAHUN 2020

WWW.MATARAMKOTA.GO.ID

BAB 1

PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah dimulai melalui proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan kondisi dan perkiraan pencapaian pembangunan tahun 2019, tantangan dan target tahun 2020 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2020 adalah **Mempercepat Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Melalui Ekonomi Lokal dan Pemulihan Infrastruktur Layanan Publik.** Makna dari tema pembangunan tahun 2020 secara garis besar diarahkan pada pemenuhan akses pelayanan dasar dalam semua sektor serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca bencana

yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Juli 2018 hingga pertengahan September (status masa tanggap darurat bencana berakhir pada 25 Agustus 2018) sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada Kota Mataram walaupun Kota Mataram bukan merupakan wilayah epicentrum gempa dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekononmi serta penurunan angka kemiskinan.

Pemenuhan akses pelayanan dasar tidak hanya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun berupaya membangun kemandirian masyarakat sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan yaitu penurunan sebesar 1 % per tahun. Sehingga, perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian target pembangunan sesuai dengan tema tersebut yang secara teknis kebijakan pembangunan dijabarkan dalam KUA.

PPAS sebagai salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD adalah rancangan program prioritas dan pagu batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Adapun informasi yang disajikan dalam PPAS adalah rencana pendapatan dan penerimaan, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara, dan rencana pembiayaan daerah, dan substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menetukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara utuk masing-masing program/ kegiatan.

Dalam upaya memenuhi kaidah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunan PPAS telah dilakukan sinkronisasi program kegiatan di unit organisasi pelaksana beserta alokasi plafon anggaran yang bersifat sementara, baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan tugas rutin operasional Perangkat Daerah dapat berjalan dengan lancar dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;

2. Kemampuan untuk memperlancar atau akselerasi pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam KUA;
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Melalui penetapan PPAS Kota Mataram tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodasi setiap permasalahan pembangunan di Kota Mataram pada tahun 2020. Selanjutnya PPAS akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Mataram Tahun 2020 yang akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dituangkan dalam RKA yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020 adalah:

a. Menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD Kota Mataram TA. 2020 dan KUA TA. 2020.
b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
d. Sebagai acuan/pedoman dalam proses penyusunan RAPBD TA. 2020.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
29. Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota mataram tahun 2020;
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB 2

RENCANA PENDAPATAN *dan* PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Daerah Kota Mataram berdasarkan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah Tahun 2020 sebagai sumber keuangan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah, dimana semakin tinggi kualitas otonomi daerah maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN guna mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan bagi hasil dari pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya. Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari SILPA pada Tahun Anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Selaras dengan arah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Mataram Tahun Anggaran 2020, target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2020 secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, target pendapatan daerah Kota Mataram TA. 2020 diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi pada tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah Kota Mataram pada TA. 2020 mengalami peningkatan sebesar **Rp.53.119.065.641,00** atau meningkat 3,75 persen dari target Pendapatan Daerah tahun 2019 yang bersumber dari peningkatan target Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,27 persen atau meningkat sebesar **Rp.41.710.404.641,00** begitu juga dengan komponen Lain-lain Pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 20,91 persen atau meningkat sebesar **Rp.36.414.029.000,00.** Namun pada dana perimbangan direncanakan mengalami penurunan sebesar 2,77 persen atau menurun sebesar **Rp.25.005.368.000,00.** Secara rinci rencana Pendapatan Daerah TA. 2020 diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada TA. 2020 direncanakan sebesar **Rp. 366.644.500.000,00.** Dimana alokasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 7,86 persen atau meningkat sebesar Rp. 26.710.404.641,00 dari target PAD TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 339.934.095.359,00. Proyeksi penerimaan PAD tahun 2020 pada masing-masing komponen PAD diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan Pajak Daerah,** pada tahun 2020 direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 0,96 persen atau meningkat sebesar Rp.1.495.000.000,00 menjadi **Rp. 157.700.000.000,00.** Proyeksi penerimaan Pajak Daerah TA. 2020 secara rinci sebagai berikut:
   - Pajak hotel mengalami penurunan target sebesar 7,41 persen dari TA. 2019 atau sebesar Rp. 2.000.000.000,00; menjadi sebesar Rp.25.000.000.000,00;
   - Pajak Restoran direncanakan mengalami peningkatan target sebesar 5,77 persen dari TA. 2019 atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00; menjadi sebesar Rp. 27.500.000.000,00;
   - Pajak Hiburan direncanakan tidak mengalami peningkatan target atau tetap sebesar Rp. 4.500.000.000,00;
   - Pajak Reklame direncanakan tidak mengalami peningkatan target atau tetap sebesar Rp. 5.500.000.000,00;
   - Pajak Penerangan Jalan direncanakan mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen atau sebesar Rp. 500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.41.500.000.000,00;
   - Pajak Parkir direncanakan mengalami peningkatan sebesar 8,00 persen atau sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.700.000.000,00;

- Pajak Air Bawah Tanah direncanakan mengalami penigkatan sebesar 42,86 persen atau sebesar Rp.300.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,00;
- Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2020 tidak ditargetkan sehingga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 100,00 persen atau sebesar Rp. 5.000.000,00 menjadi Rp. 0;
- PBB Perdesaan dan Perkotan direncanakan tidak mengalami peningkatan target atau tetap sebesar Rp. 27.000.000.000,00;
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 4,55 persen atau sebesar Rp. 1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 23.000.000.000,00.

b. **Hasil Retribusi Daerah,** terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang diatur oleh Peraturan daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011; Retribusi Jasa Usaha yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011; dan Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011. Pada TA. 2020, Hasil Retribusi Daerah direncanakan sebesar **Rp. 37.477.000.000,00**. Target ini direncanakan meningkat sebesar 67,79 persen atau sebesar Rp. 15.141.000.000,00 dari target TA. 2019. Secara rinci proyeksi penerimaan Hasil Retribusi Daerah TA. 2020 sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 81,22 persen atau meningkat sebesar Rp. 15.006.000.000,00 menjadi sebesar Rp.33.481.000.000,00; yang terdiri dari:
   - retribusi pelayanan kesehatan, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
   - retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 5.050.000.000,00;
   - retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, direncanakan mengalami peningkatan target dari TA. 2019 sebesar 300 persen yaitu sebesar Rp.15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 20.000.000.000,00.
   - retribusi pelayanan pasar, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
   - retribusi pengujian kendaraan bermotor, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.700.000.000,00;
   - retribusi pelayanan tera/tera ulang, direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp.6.000.000,00 menjadi sebesar Rp.66.000.000,00.

- retribusi pengendalian menara telekomunikasi, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target TA. 2019 yaitu sebesar Rp.600.000.000,00;
- retribusi penyediaan dan/penyedotan kakus, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.65.000.000,00.

2) Retribusi Jasa Usaha, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 3,91 persen atau sebesar Rp. 50.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.330.000.000,00; terdiri dari:
   - Retribusi pemakaian kekayaan daerah, direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 12.000.000,00 menjadi sebesar Rp.35.000.000,00
   - retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, direncanakan mengalami penigkatan sebesar 1,25 persen dari target TA. 2019 atau sebesar Rp. 13.000.000,00, menjadi sebesar Rp. 1.055.000.000,00;
   - retribusi rumah potong hewan, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 11,63 persen atau sebesar Rp. 25.000.000,00 menjadi sebesar Rp.240.000.000,00.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 3,29 persen atau meningkat sebesar Rp. 85.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.666.000.000,00; terdiri dari:
   - retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.2.500.000.000,00;
   - retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.10.000.000,00;
   - retribusi izin trayek, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00;
   - retribusi Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA), direncanakan penigkatan 130.77 persen atau sebesar Rp. 85.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 150.000.000,00.

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,** pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan perubahan dari target TA. 2019 yaitu sebesar 19,83 persen atau meningkat sebesar Rp. 1.624.404.641,00 menjadi sebesar Rp. 9.817.500.000,00. Proyeksi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2019 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah/BUMD kepada:
   - PT Bank NTB, yang direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 4.300.000.000,00;

- PDAM Giri Menang, yang direncanakan mengalami peningkatan sebesar 47,25 persen atau meningkat sebesar Rp. 1.604.404.641,00 menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
- PT. BPR NTB Mataram, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 497.500.000,00.
- PT. Jamkrida NTB, pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 100,00 persen dari TA. 2019 yang semula Rp.0 menjadi sebesar Rp. 20.000.000,00.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,** pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 15,31 persen atau meningkat sebesar Rp. 23.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp. **176.650.000.000,00**. Proyeksi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA. 2020, sebagai berikut:
   - Penerimaan Jasa Giro, direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.
   - Penerimaan bunga deposito, direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2019 sebesar 50,00 persen atau sebesar Rp. 2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.500.000.000,00;
   - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, tidak ditargetkan sehingga mengalami penurunan target dari TA. 2019 yaitu sebesar 100,00 persen atau menurun sebesar Rp. 50.000.000,00.
   - Fasilitas sosial dan fasilitas umum, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00;
   - Pendapatan BLUD, direncanakan mengalami peningkatan sebesar 20,00 persen atau meningkat sebesar Rp. 26.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.156.000.000.000,00.
   - Lain-lain PAD yang Sah lainnya, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,00;
   - Pendapatan Dana Kapitasi JKN, direncanakan tidak mengalami perubahan target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 15.500.000.000,00

2.1.2. Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada TA. 2020 pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan direncanakan mengalami penurunan sebesar 2,77 persen atau menurun sebesar Rp.25.005.368.000,00 dari target TA. 2019 yaitu dari sebesar Rp.901.395.827.000,00 menjadi sebesar **Rp. 876.390.459.000,00.** Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2020 sebagai berikut:

1) **Bagi Hasil Pajak**, pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan dari target dari TA. 2019 sebesar 0,83 persen atau Rp.443.592.000,00 menjadi sebesar Rp. 53.974.281.000,00. Secara rinci proyeksi dana Bagi Hasil Pajak TA. 2020 yaitu:
   - Pajak penghasilan, direncanakan mengalami peningkatan dari target TA. 2019 sebesar Rp.648.971.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp.22.092.413.000,00;
   - Bagian PBB direncanakan mengalami penurunan dari target dari TA. 2019 sebesar 4,07 persen atau sebesar Rp.205.379.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp. 4.838.874.000,00;
   - Cukai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), direncanakan tidak mengalami perubahan dari target dari TA. 2019 yaitu sebesar Rp.27.042.994.000,00.

2) **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**, pada TA. 2020 direncanakan mengalami penurunan dari target dari TA. 2019 sebesar 19,21 persen atau Rp. 3.775.597.000,00 menjadi sebesar Rp. 15.883.640.000,00 terdiri dari:
   - Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, direncanakan mengalami peningkatan dari target dari TA. 2019 sebesar 34,72 persen atau Rp.5.932.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp. 23.016.000,00.
   - Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, direncanakan mengalami penurunan dari target dari TA. 2019 sebesar 48,88 persen atau Rp.480.803.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp. 502.790.000,00.
   - Bagi hasil dari mineral dan batu bara (royalti) mengalami penurunan dari target dari TA. 2019 sebesar 17,69 persen atau sebesar Rp.3.300.726.000,00 menjadi sebesar Rp. 15.357.834.000,00.

3) **Dana Alokasi Umum (DAU)**, diasumsikan mengalami perubahan dari target APBD TA. 2019 sebesar 1,33 persen atau sebesar Rp. 8.388.150.000,00 menjadi sebesar Rp. 641.141.879.000,00.

4) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**, direncanakan mengalami penurunan dari target TA. 2019 sebesar 15,38 persen atau Rp.30.061.513.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp. 165.390.659.000,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Pendapatan Lainnya; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pada TA. 2020 pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami peningkatan dari target TA. 2019 yaitu sebesar 20,91 persen atau meningkat sebesar Rp. 36.414.029.000,00 menjadi sebesar **Rp.210.598.984.681,00.** Rincian Proyeksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2020 sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah, pada TA. 2020 direncanakan mengalami penurunan target dari TA. 2019 sebesar 5,66 persen atau menurun sebesar Rp. 3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 49.984.200.000,00;
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau meningkat sebesar 2,83 persen dari target TA. 2019 yaitu sebesar Rp.88.205.552.681,00 menjadi sebesar Rp.90.705.552.681,00;
- Pendapatan Lainnya, direncanakan mengalami peningkatan dari target TA. 2019 sebesar 111,88 persen atau sebesar Rp. 36.914.029.000,00 yaitu menjadi sebesar Rp. 69.909.232.000,00.

2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran sebagai akibat lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Pada TA. 2020, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan sebesar 220,90 persen atau meningkat sebesar Rp.92.106.695.103,87 dari target TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 41.696.539.919,25 menjadi sebesar Rp. 133.803.235.023,12. Secara rinci target Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Penerimaan Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah
Kota Mataram TA. 2020

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2019	APBD 2020		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
	PENDAPATAN DAERAH	**1.415.514.878.040,00**	**1.468.633.943.681,00**	**53.119.065.641,00**	**3,75**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**339.934.095.359,00**	**381.644.500.000,00**	**41.710.404.641,00**	**12,27**
A	**Pendapatan Pajak Daerah**	**156.205.000.000,00**	**157.700.000.000,00**	**1.495.000.000,00**	**0,96**
1	Pajak Hotel	27.000.000.000,00	25.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(7,41)
2	Pajak Restoran	26.000.000.000,00	27.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5,77
3	Pajak Hiburan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	-
4	Pajak Reklame	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	41.500.000.000,00	500.000.000,00	1,22
6	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	200.000.000,00	8,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	700.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	42,86
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(100,00)
9	PBB Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	-	-
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.000.000.000,00	23.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4,55
B	**Hasil Retribusi Daerah**	**22.336.000.000,00**	**37.477.000.000,00**	**15.141.000.000,00**	**67,79**
B.1	***Retribusi Jasa Umum***	**18.475.000.000,00**	**33.481.000.000,00**	**15.006.000.000,00**	**81,22**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	-	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5.000.000.000,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	300,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000,00	700.000.000,00	-	-
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	60.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00	-
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-
B.2	***Retribusi Jasa Usaha***	**1.280.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	50.000.000,00	3,91
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.000.000,00	35.000.000,00	12.000.000,00	-
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	1.042.000.000,00	1.055.000.000,00	13.000.000,00	1,25
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	215.000.000,00	240.000.000,00	25.000.000,00	11,63
B.3	***Retribusi Perizinan Tertentu***	***2.581.000.000,00***	***2.666.000.000,00***	**85.000.000,00**	**3,29**
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2019	APBD 2020		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
3	Retribusi Izin Trayek	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-
4	Retribusi IMTA	65.000.000,00	150.000.000,00	85.000.000,00	130,77
C	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**8.193.095.359,00**	**9.817.500.000,00**	**1.624.404.641,00**	19,83
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	**8.193.095.359,00**	**9.817.500.000,00**	**1.624.404.641,00**	19,83
1	PT. Bank NTB	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-	-
2	PDAM Giri Menang	3.395.595.359,00	5.000.000.000,00	1.604.404.641,00	47,25
3	PT. BPR NTB Mataram	497.500.000,00	497.500.000,00	-	-
4	PT. Jamkrida NTB	-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
D	**Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**153.200.000.000,00**	**176.650.000.000,00**	**23.450.000.000,00**	15,31
1	Penerimaan Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
2	Penerimaan Bunga Deposito	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(2.500.000.000,00)	(50,00)
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(100,00)
4	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
5	Pendapatan BLUD	130.000.000.000,00	156.000.000.000,00	26.000.000.000,00	20,00
6	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	-
II	**DANA PERIMBANGAN**	**901.395.827.000,00**	**876.390.459.000,00**	**(25.005.368.000,00)**	**(2,77)**
A	**Bagi Hasil Pajak**	**53.530.689.000,00**	**53.974.281.000,00**	**443.592.000,00**	**0,83**
1	*Pajak Penghasilan*	*21.443.442.000,00*	*22.092.413.000,00*	*648.971.000,00*	3,03
2	*PBB*	*5.044.253.000,00*	*4.838.874.000,00*	*(205.379.000,00)*	(4,07)
a	Bagi Rata	-	3.558.973.000,00	3.558.973.000,00	100,00
	Bagian PBB Pusat (6,5%)	5.044.253.000,00	-	(5.044.253.000,00)	(100,00)
b	Bagian Daerah	-	1.236.951.000,00	1.236.951.000,00	100,00
	- Sektor Pertambangan (Minyak Bumi dan Gas Bumi)	-	1.161.038.000,00	1.161.038.000,00	100,00
	- Sektor Lainnya	-	75.913.000,00	75.913.000,00	100,00
c	Biaya Pemungutan	-	42.950.000,00	42.950.000,00	100,00
	- Sektor Pertambangan (Minyak Bumi dan Gas Bumi)	-	40.314.000,00	40.314.000,00	100,00
	- Sektor Lainnya	-	2.636.000,00	2.636.000,00	100,00
3	Cukai	27.042.994.000,00	27.042.994.000,00	-	-
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	27.042.994.000,00	27.042.994.000,00	-	-

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2019	APBD 2020		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
B	**Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA**	**19.659.237.000,00**	**15.883.640.000,00**	**(3.775.597.000,00)**	**(19,21)**
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	17.084.000,00	23.016.000,00	5.932.000,00	34,72
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	502.790.000,00	(480.803.000,00)	(48,88)
3	Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara (Royalti)	18.658.560.000,00	15.357.834.000,00	(3.300.726.000,00)	(17,69)
C	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**632.753.729.000,00**	**641.141.879.000,00**	**8.388.150.000,00**	**1,33**
1	DAU	614.246.829.000,00	614.246.829.000,00	-	-
2	DAU Tambahan	18.506.900.000,00	17.500.000.000,00	(1.006.900.000,00)	(5,44)
3	DAU Bantuan Penggajian PPPK	-	9.395.050.000,00	9.395.050.000,00	100,00
D	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**195.452.172.000,00**	**165.390.659.000,00**	**(30.061.513.000,00)**	(15,38)
I	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler**	**75.602.947.000,00**	**52.908.408.000,00**	**(22.694.539.000,00)**	(30,02)
1	DAK Bidang Pendidikan	22.411.784.000,00	11.895.986.000,00	(10.515.798.000,00)	(46,92)
	Pendidikan SD/SDLB	17.155.431.000,00	5.873.556.000,00	(11.281.875.000,00)	(65,76)
	Pendidikan SMP	2.522.223.000,00	4.496.345.000,00	1.974.122.000,00	78,27
	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	2.734.130.000,00	1.526.085.000,00	(1.208.045.000,00)	(44,18)
2	DAK Bidang Kesehatan dan KB	27.675.390.000,00	23.648.747.000,00	(4.026.643.000,00)	(14,55)
	Pelayanan Dasar	3.164.195.000,00	1.941.043.000,00	(1.223.152.000,00)	(38,66)
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.100.559.000,00	18.638.914.000,00	(1.461.645.000,00)	(7,27)
	Pelayanan Kefarmasian	2.210.765.000,00	1.602.690.000,00	(608.075.000,00)	(27,51)
	Keluarga Berencana	2.199.871.000,00	1.466.100.000,00	(733.771.000,00)	(33,36)
3	DAK Sanitasi	3.043.766.000,00	1.740.000.000,00	(1.303.766.000,00)	(42,83)
4	DAK Perumahan dan Permukiman	5.245.218.000,00	2.851.983.000,00	(2.393.235.000,00)	(45,63)
5	DAK Pertanian	3.045.427.000,00	-	(3.045.427.000,00)	(100,00)
6	DAK Kelautan dan Perikanan	1.720.516.000,00	-	(1.720.516.000,00)	(100,00)
7	DAK Jalan	12.460.846.000,00	12.771.692.000,00	310.846.000,00	2,49
II	**DAK PENUGASAN**	**22.044.416.000,00**	**20.792.118.000,00**	**(1.252.298.000,00)**	(5,68)
1	Kesehatan dan KB	1.031.220.000,00	1.610.288.000,00	579.068.000,00	100,00
	Penurunan Stunting	608.765.000,00	-	(608.765.000,00)	(100,00)
	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	422.455.000,00	1.610.288.000,00	1.187.833.000,00	281,17
2	Sanitasi	-	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
3	Irigasi	4.409.921.000,00	4.618.904.000,00	208.983.000,00	4,74
4	Pertanian	-	2.590.896.000,00	2.590.896.000,00	100,00
5	Pasar	1.463.680.000,00	-	(1.463.680.000,00)	(100,00)
6	Industri Kecil dan Menengah	-	1.209.929.000,00	1.209.929.000,00	100,00

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2019	APBD 2020		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
7	Kelautan dan Perikanan	-	2.440.762.000,00	2.440.762.000,00	100,00
8	Pariwisata	3.819.157.000,00	3.453.840.000,00	(365.317.000,00)	(9,57)
9	Lingkungan Hidup	808.817.000,00	-	(808.817.000,00)	(100,00)
10	Jalan Prioritas Daerah	10.511.621.000,00	-	(10.511.621.000,00)	(100,00)
11	Jalan - Bidang Keselamatan Jalan	-	4.417.499.000,00	4.417.499.000,00	100,00
III	**DAK NON FISIK**	**97.804.809.000,00**	**91.690.133.000,00**	**(6.114.676.000,00)**	(6,25)
1	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.752.200.000,00	6.209.400.000,00	457.200.000,00	7,95
2	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	899.300.000,00	728.000.000,00	(171.300.000,00)	(19,05)
3	DAK Tunjangan Profesi Guru	77.146.877.000,00	71.797.407.000,00	(5.349.470.000,00)	(6,93)
4	DAK Tambahan Penghasilan Guru	888.000.000,00	645.000.000,00	(243.000.000,00)	(27,36)
5	DAK Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	10.642.444.000,00	9.360.282.000,00	(1.282.162.000,00)	(12,05)
	- Bantuan Operasional Kesehatan	*6.878.789.000,00*	*6.068.199.000,00*	(810.590.000,00)	(11,78)
	- Akreditasi Puskesmas	*678.600.000,00*	*816.770.000,00*	138.170.000,00	20,36
	- Jaminan Persalinan	*1.282.000.000,00*	*521.470.000,00*	(760.530.000,00)	(59,32)
	- Pengawasan Obat dan Makanan	*-*	*55.839.000,00*	55.839.000,00	100,00
	- Bantuan Operasional KB	*1.803.055.000,00*	*1.898.004.000,00*	94.949.000,00	5,27
6	DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	359.000.000,00	417.358.000,00	58.358.000,00	16,26
7	DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.203.950.000,00	1.571.282.000,00	367.332.000,00	30,51
8	DAK Dana Pelayanan Kepariwisataan	913.038.000,00	961.404.000,00	48.366.000,00	5,30
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**174.184.955.681,00**	**210.598.984.681,00**	**36.414.029.000,00**	20,91
A	**Pendapatan Hibah**	**52.984.200.000,00**	**49.984.200.000,00**	**(3.000.000.000,00)**	(5,66)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	(100,00)
2	Hibah Dana BOS	49.984.200.000,00	49.984.200.000,00	-	-
B	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	**88.205.552.681,00**	**90.705.552.681,00**	**2.500.000.000,00**	2,83
	Pajak Kendaraan Bermotor	27.124.605.000,00	28.124.605.000,00	1.000.000.000,00	3,69
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.035.294.256,00	22.035.294.256,00	1.000.000.000,00	4,75
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.354.701.925,00	18.854.701.925,00	500.000.000,00	2,72
	Pajak Air Permukaan (PAP)	31.900.000,00	31.900.000,00	-	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	21.659.051.500,00	21.659.051.500,00	-	-
C	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	**-**	**-**	**-**	

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	%
		APBD 2019	APBD 2020		
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
D	**Pendapatan Lainnya**	**32.995.203.000,00**	**69.909.232.000,00**	**36.914.029.000,00**	**111,88**
1	**Pendapatan Lainnya (Dana Insentif Daerah)**	**32.995.203.000,00**	**69.909.232.000,00**	36.914.029.000,00	111,88
	Kelompok kategori peningkatan Investasi		13.202.350.000,00		
	Kelompok kategori kualitas Realisasi Belanja		8.931.023.000,00		
	Kelompok Kategori Mandatory Spending		250.000.000,00		
	Kelompok Kategori Partisipasi Murni		11.410.390.000,00		
	Kelompok Kategori Penanganan Stunting		10.154.291.000,00		
	Kelompok Kategori Balita yang mendapatkan Imunisasi lengkap		11.143.939.000,00		
	Kelompok Kategori Sumber Air Minum Layak		11.218.991.000,00		
	Kelompok Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah		3.598.248.000,00		
	PEMBIAYAAN DAERAH	**30.803.444.560,25**	**124.305.735.023,12**	**93.502.290.462,87**	**303,54**
I	**PENERIMAAAN PEMBIAYAAN**	**41.696.539.919,25**	**133.803.235.023,12**	**92.106.695.103,87**	**220,90**
1	SILPA TA. Sebelumnya	41.696.539.919,25	15.803.235.023,12	(25.893.304.896,13)	(62,10)
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	100,00

BAB 3

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Bab ini berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tertuang Visi pembangunan Nasional yang merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".** Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan Nasional adalah melalui penerapan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan Visi pembangunan Nasional 2015-2019, maka pembangunan nasional akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro.
   a. Pembangunan manusia dan masyarakat
   b. Ekonomi Makro
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
   a. Kependudukan dan Keluarga Berencana
   b. Pendidikan
   c. Kesehatan
   d. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   e. Perlindungan Anak
   f. Pembangunan Masyarakat
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan.
   a. Kedaulatan Pangan
   b. Kedaulatan Energi
   c. Maritim dan Kelautan
   d. Pariwisata dan Industri Manufaktur
   e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan.
   a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi
   b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu
5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah.
   a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
   a. Politik dan Demokrasi
   b. Penegakan Hukum
   c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
   d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah
   e. Pertahanan dan Keamanan

Dalam rangka menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, maka pembangunan nasional Indonesia diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu juga diarahkan pada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan

sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Strategi Pembangunan Nasional menggariskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
   a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
   b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah.
   c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan
   a. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat.
   b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan prioritas: kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dab industri.
   c. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah.
3. Kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas.
4. Quickwins, yaitu hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1.

Strategi Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional tahun 2020 sebagai tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah 2020-2024 dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2020 Tema RKP 2020 adalah

" Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas "

Berdasarkan tema tersebut, Penyusunan RKP tahun 2020 dilakukan dengan: Melanjutkan pembangunan 2019, Merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 dan dilaksanakan melalui 5 (lima) prioritas nasional meliputi:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
2. Infrastruktur dan Pemerataan wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2020 yaitu :

1. **Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan**, dengan program prioritas meliputi :

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan Iptek-Inovasi.
d. Pengentasan kemiskinan.
e. Pembangunan budaya karakter,dan prestasi bangsa

2. **Infrastruktur dan Pemerataan wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Perluasan infrastruktur dasar.
   b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
   c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
   e. Transformasi Digital
3. **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
   b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi
   c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
   d. Peningktan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
   e. Perkuatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, ,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
   b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air.
   c. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
   d. Peningkatan Kualiatas Lingkungan.
   e. Penguatan Ketahanan Bencana.
5. **Stabilitas Pertahanan dan Kemanan**, dengan program prioritas meliputi :
   a. Penguatan Kemampuan pertahanan.
   b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional.
   c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi
   d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
   e. Penanggulangan Narkotika dan penguatan kamtibmas.

Adapun sasaran pembangunan nasional pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Target pembangunan nasional tahun 2020 pada beberapa indikator makro dapat disajikan sebagai berikut :

Indikator	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,51

2. Arah kebijakan pembangunan nasional antara lain :
   a. Meningkatkan pertumbuhan potensial indonesia yang dilakukan dengan cara Transformasi srtruktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan dan transformasi sektor jasa, serta penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombank pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
   b. Menjaga stabilitas makroekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga, ekternal dan sektor keuangan.
   c. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan angka kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan dan mempertahankan keseimbangan lingkungan

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, tertuang Visi pembangunan Provinsi NTB, yaitu **"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"**. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. NTB Tangguh dan mantap
2. NTB Bersih dan Melayani
3. NTB Sehat dan Cerdas
4. NTB Asri dan Lestari
5. NTB Sejahtera dan Lestari
6. NTB Aman dan Berkah

Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengambil tema **"Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari"**.
Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2020 yaitu :

1. **Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
   b. Mitigasi bencana.
   c. Infrastruktur dasar.
   d. Infrastruktur kawasan.
   e. Konektivitas wilayah.
   f. Teknologi informasi dan komunikasi

   Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas telekomunikasi.

2. **Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan** program prioritas meliputi :
   a. Pemerataan Pendidikan
   b. Akses Pelayanan Kesehatan
   c. Pengentasan Kemiskinan
   d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
   e. Perlindungan Sosial

   Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitaslisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia dan NTB juara.

3. **Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan investor sektor riil
   b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
   c. Pengembangan Pariwisata
   d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
   e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

   Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju, UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99 desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.

4. **Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
   b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
   c. Peningkatan Daya Dukung SDA
   d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB *zero waste*, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah.

5. **Pelayanan Publik dan Penangngan Masalah Sosial Darurat, ,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
   b. Optimalisasi Pendapatan daerah
   c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
   d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
   e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

   Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs *centre, Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram

Menelaah arah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan tahun kelima RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yaitu upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB, menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2020 dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, dan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021 tertuang Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah: **"Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya".** Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

4. Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun ketiga, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016-2021 ditujukan untuk:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan:
   a. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;
   b. tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;
   c. terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;
   d. terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;
   e. terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;
   f. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lahan dan tercapainya prinsip pembangunan berkelanjutan;
   g. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Kesejehateraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan:
   a. tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;
   b. meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;
   c. membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
   d. meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;
   e. meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;
   f. meningkatnya kesetaraan gender;
   g. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
   h. meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta *profesional (good governance*) yang mampu mendukung pembangunan.
3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan SDM yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan:
   a. meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;
   b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
   c. tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan rendahnya atau menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
   d. terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju

dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat)

Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun 2018, perkiraan tahun 2019 dan tantangan maupun target tahun 2020 serta diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 dan Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2020, maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam MPBM RKPD Kota Mataram Tahun 2019 adalah **"Mempercepat pengembangan kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur layanan publik serta kelanjutan program pascabencana"**.

Berdasarkan Tema pembangunan tahun 2020 tersebut ditetapkan **Isu** strategis prioritas untuk tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan
3. Nilai tambah ekonomi;
4. Kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur permukiman;
5. Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Pada tahun 2020, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: pertumbuhan ekonomi; laju inflasi; angka kemiskinan; angka harapan lama sekolah; angka rata-rata lama sekolah; angka pendidikan yang ditamatkan, partisipasi angkatan kerja perempuan; pendapatan perkapita; angka Indeks Pembangunan Manusia; skor Pola Pangan Harapan; tingkat pengangguran terbuka; dan jumlah lembaga ekonomi produktif berbasis keagamaan.
2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: presentase penduduk ber-KTP; prevalensi balita gizi buruk; persentase puskesmas yang terakreditasi; angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; persentase pranata adat terhadap jumlah lingkungan; persentase penanganan pelanggaran PERDA dan PERWAL; cakupan peserta KB aktif; cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; jumlah perpustakaan pada tempat ibadah; proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak; persentase rumah tangga pengguna air bersih; persentase rumah layak huni; rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah; persentase kesesuaian rencana tata ruang; dan persentase penanganan sampah.

3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu: target opini laporan keuangan pemerintah daerah; proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah; proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah; target penilaian maturitas SPIP; target penilaian kapabilitas APIP; kunjungan wisatawan; angka kriminalitas; cakupan SKPD yang menyelenggarakan informasi publik berbasis IT; cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar *ombudsman*; indeks kepuasan layanan masyarakat; jumlah inovasi pelayanan publik; nilai investasi; tingkat perkembangan WUB; penerapan standar pelayanan minimum; dan pendaftaran HAKI produk hasil karya daerah.

Dalam mewujudkan capaian sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Mataram menetapkan prioritas pembangunan tahun 2016-2021 sesuai dengan isu strategis yaitu:

1. Budaya
2. Kondusifitas Wilayah
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Daya saing pekonomian Daerah
6. Kemiskinan
7. Infrastruktur
8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil,
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan program Prioritas Pembangunan Kota Mataram tahun 2020 sebagaimana dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.2

Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2020

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan	Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	- Indeks Kedalaman Kemiskinan :1,51 - Indeks Keparahan Kemiskinan : 0,32 - Persentase Keluarga Pra Sejahtera : 9,30 - Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP) : 3 - 4	1)Sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan kelanjutan program pascabencana; 2)Evaluasi data kemiskinan 3)Komitmen pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				4) Pencapaian target program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 5) Penguatan pelaksanaan bansos tepat sasaran 6) Pengembangan pekarangan untuk pengembangan pangan 7) Pembentukan dan pembinaan kelompok KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) 8) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan 9) Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
2	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	- Harapan Lama Sekolah (HLS) : 15,73 - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) : 9,53	1) Pemerataan kualitas tenaga pendidik di semua satuan pendidikan dasar 2) Pemerataan sarpras penunjang layanan pendidikan 3) Penguatan kelembagaan pendidikan (akreditasi sekolah) 4) Penguatan kapasitas pengawas pendidikan 5) Penguatan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 6) Evaluasi data pokok pendidikan
3	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	- Angka Harapan Hidup (AHH) : 71,73 - Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat : 0.647	1) Memperkuat upaya kesehatan promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) 2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				3) Memperkuat pencegahan dan pengendalian penyakit 4) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan	- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan - Terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	- Pertumbuhan Ekonomi:8,27% - PDRB per Kapita : Rp. 30.999.058,00 - Laju Inflasi :3 ± 1Indeks Gini :0,334 - Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) :93,98 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :6,02	1) Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion) 2) Promosi pariwisata melalui event-event olahraga, keagamaan dan budaya 3) Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN 4) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan I/UMKM 5) Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi 6) Integrasi program Gemar Makan Ikan (GEMARI) dengan pengembangan usaha kuliner berbasis Ikan 7) Perluasan akses informasi lapangan pekerjaan 8) Peningkatan keterampilan wirausaha produktif 9) Perluasan akses kemitraan dengan dunia usaha dan industri 10) Pengembangan komoditi dan teknologi pertanian berbasis lahan terbatas perkotaan 11) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				12) Evaluasi data ekonomi makro dan mikro daerah
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur permukiman	- Tersedianya penunjang infrastruktur permukiman, perekonomian dan sosial yang berkelanjutan - Tercapaianya standar kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kota Layak Huni :65- - Persentase Kesesuaian Pemafaatan ruang :80 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :62	1) Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh perkotaan dan kelanjutan penanganan program pascabencana; 3) Pengembangan akses air bersih, pengelolaan air limbah domestik komunal dan skala kota 4) Penanganan Sanitasi perkotaan 5) normalisasi sungai dan saluran drainase perkotaan (penanganan banjir) 6) Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum difabel. 7) Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 8) Pengendalian pemanfaatan ruang 9) Penyebaran informasi penataan ruang 10) Evaluasi dan Penguatan Pokja LISAN 11) Evaluasi manajemen penanganan sampah perkotaan 12) pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan tanah) 13) Manajemen rekayasa lalu lintas 14) Evaluasi sistem transportasi publik 15) Pengelolaan parkir 16) Evaluasi data infrastruktur perkotaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	TARGET	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
6	Peningkatan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana,	terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana.	6 kelurahan tangguh bencana (daerah rawan bencana)	1) Penguatan Kelembagaan penanganan bencana 2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7	Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik	- Indeks Reformasi Birokrasi : BB - Nilai AKIP : 80 - Opini BPK :WTP - Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan : A	1) Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik 2) Evaluasi pelaksanaan Smart City dan *e-Governance* 3) Optimalisasi sistem administrasi kependudukan dan Capil 4) Peningkatan Koordinasi, Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan 5) Peningkatan pengelolaan sistem layanan keuangan daerah 6) Optimalisasi sistem administrasi kepegawaian

BAB 4

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN *dan* PROGRAM/KEGIATAN

Bab ini berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja; program kegiatan serta plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pada TA. 2020, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, yaitu:

1. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
   a. Pendidikan;
   b. Kesehatan;
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
   e. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
   f. Sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   a. Tenaga Kerja;
   b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   c. Pangan;

d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika;
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
l. Penanaman Modal;
m. Kepemudaan dan Olah raga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Perpustakaan;
q. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
   a. Kelautan dan Perikanan;
   b. Pariwisata;
   c. Pertanian;
   d. Perdagangan;
   e. Perindustrian;
   f. Transmigrasi.

Selain pelaksanaan urusan pemerintahan daerah diatas, Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan fungsi penunjang atau pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi pendukung pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja daerah Kota Mataram bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran tersebut. Kebijakan anggaran Belanja Daerah TA. 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif oleh karena itu kebijakan belanja pada tahun 2020 diarahkan untuk:

A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:

1. Belanja pegawai, dianggarkan untuk kebutuhan pembayaran: gaji pokok dan tunjangan PNSD, memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, anggaran tambahan penghasilan

PNSD berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 1 tahun; penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; Dana Alokasi Non Fisik.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, dialokasikan dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
3. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk bantuan keuangan kepada partai politik dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014.
4. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung, terdiri dari:

1. Penganggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; dan fungsi penunjang atau pendukung Urusan Pemerintahan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

2. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai pencapaian target RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021.
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Berupaya mengalokasikan Anggaran Dana Kelurahan sebesar 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Mataram.
7. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka penguatan, pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya sebesar 0,75 persen dari total Belanja Daerah dan diatas Rp. 10.000.000.000,00.
8. Berupaya mengalokasikan anggaran program kegiatan yang mejadi komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
9. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat; penanggulangan kemiskinan; akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; serta alokasi kekurangan klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
10. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan; pencapaian pelaksanaan Program Nasional “100-0-100”; dan pelaksanaan program unggulan lainnya serta alokasi anggaran untuk Program Sambungan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
11. Penataan ornamen, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pembangunan infrastruktur publik lainnya.
12. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kebersihan dari skala lingkungan melalui pemberdayaan kelembagaan lingkungan (dana lingkungan) hingga peningkatan pelayanan kebersihan skala kota.
13. Pengalokasian anggaran dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta anggaran dalam rangka pencegahan pungli.
14. Pengalokasian anggaran pemindahan dan pembangunan Gedung Kantor Walikota, pembangunan Grha DPRD Kota Mataram serta pembangunan/ pemeliharaan gedung kantor lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
15. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana perkotaan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
16. Pengalokasian anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan dan event yang dilaksanakan di Kota Mataram.

17. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Kebutuhan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Honor Daerah (Honda).
18. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan pada layanan rujukan dengan pembangunan dan peningkatan Sarana Gedung RSUD Kota Mataram.

Adapun pengalokasian Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan, sebagai berikut:

1. Menetapkan besaran kebutuhan Belanja Pegawai pada item Belanja Tidak Langsung.
2. Menetapkan besaran kebutuhan program-program unggulan, serta terobosan.
3. Menetapkan besaran dan alokasi kebutuhan program yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN.
4. Menetapkan besaran kebutuhan anggaran reviu atas diterimanya Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) dari Pemerintah.
5. Menetapkan besaran kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
6. Menetapkan besaran anggaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik termasuk didalamnya anggaran rekening PJU; besaran anggaran pelayanan kesehatan di Puskesmas; serta besaran anggaran operasional Pendidikan Dasar.
7. Menetapkan besaran anggaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
8. Menetapkan besaran anggaran untuk Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
9. Menetapkan kebutuhan dan besaran belanja minimum setiap Perangkat Daerah serta diupayakan untuk efisien dan rasional untuk alokasi belanja operasional Perangkat Daerah.

Belanja Daerah pada PPAS TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan sebesar **Rp.146.621.356.103,87** atau meningkat sebesar **10,14** persen dari alokasi Belanja Daerah pada APBD TA. 2019 yaitu sebesar Rp.1.446.318.322.600,25 menjadi sebesar **Rp. 1.592.939.678.704,12**; terdiri dari:

1. **Belanja Tidak Langsung**, pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan sebesar **Rp. 27.155.244.636,87** atau 4,62 persen dari alokasi Belanja Tidak Langsung pada APBD TA. 2019 yaitu sebesar Rp.587.560.967.741,00 menjadi sebesar **Rp. 614.716.212.377,87**; untuk kebutuhan: (i) *belanja pegawai,* direncanakan sebesar Rp. 545.281.282.807,87; (ii) *belanja hibah,* direncanakan sebesar Rp.56.746.690.000,00; (iii) *belanja bantuan sosial,* direncanakan sebesar Rp.

6.330.743.850,00; (iv) *belanja bantuan keuangan*, direncanakan sebesar Rp. 2.357.495.720,00; dan (v) *belanja tidak terduga,* direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

2. **Belanja Langsung**, pada TA. 2020 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 13,91 persen atau meningkat sebesar **Rp. 119.466.111.467,00** dari alokasi Belanja Langsung pada APBD TA. 2019 yaitu sebesar Rp.858.757.354.859,25 menjadi sebesar **Rp. 978.223.466.326,25;** yang direncanakan untuk kebutuhan: (i) *belanja pegawai,* (ii) *belanja barang dan jasa*, dan (iii) *belanja modal.*

   Lebih lanjut, *plafon* anggaran sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara
Belanja Tidak Langsung dan **Belanja Langsung**

No	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2020 (Rp.)	KET
2	**BELANJA DAERAH**	**1.592.939.678.704,12**	
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**614.716.212.377,87**	
	Belanja Pegawai	545.281.282.807,87	
	Belanja Hibah	56.746.690.000,00	
	Belanja Bantuan Sosial	6.330.743.850,00	
	Belanja Bantuan Keuangan	2.357.495.720,00	
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**978.223.466.326,25**	

Pada TA. 2020 plafon anggaran sementara dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, terdistribusi untuk:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 935.036.398.710,00;** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328.253.545.511,00; dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 606.782.853.199,00.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** direncanakan sebesar **Rp. 262.055.099.233,25;** terdiri dari alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 87.033.173.410,00 dan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 175.021.925.823,25.

3. **Urusan Pemerintahan Pilihan** direncanakan sebesar **Rp.47.250.883.537,00;** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.19.552.689.028,00 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.27.698.194.509,00.
4. **Fungsi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang** direncanakan sebesar **Rp. 348.597.297.223,87;** terdiri dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.179.876.804.428,87 dan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.168.720.492.795,00.

Alokasi Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2020 berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 4.2 dan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 4.3, berikut ini.

Tabel 4.2.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**
Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kota Mataram TA. 2020

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1			2	3	4	5
1			**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**328.253.545.511,00**	**606.782.853.199,00**	**935.036.398.710,00**
1	1		**Pendidikan**	**229.142.329.185,00**	**85.744.023.774,00**	**314.886.352.959,00**
1	1	1	Dinas Pendidikan	229.142.329.185,00	85.744.023.774,00	314.886.352.959,00
1	2		**Kesehatan**	**63.991.623.466,00**	**368.506.473.788,00**	**432.498.097.254,00**
1	2	1	Dinas Kesehatan	43.190.031.726,00	47.506.637.708,00	90.696.669.434,00
1	2	2	RSUD Kota Mataram	20.801.591.740,00	320.999.836.080,00	341.801.427.820,00
1	3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**8.549.101.727,00**	**94.236.301.090,00**	**102.785.402.817,00**
1	3	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.549.101.727,00	94.236.301.090,00	102.785.402.817,00
1	4		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**5.394.929.609,00**	**37.982.169.585,00**	**43.377.099.194,00**
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.394.929.609,00	37.982.169.585,00	43.377.099.194,00
1	5		**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	**18.476.805.632,00**	**14.807.607.463,00**	**33.284.413.095,00**
1	5	1	Satuan Polisi Pamong Praja	7.878.139.582,00	4.470.120.434,00	12.348.260.016,00
1	5	2	Dinas Pemadam Kebakaran	5.609.450.321,00	2.663.950.000,00	8.273.400.321,00
1	5	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.353.417.016,00	4.406.185.679,00	6.759.602.695,00
1	5	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.635.798.713,00	3.267.351.350,00	5.903.150.063,00
1	6		**Sosial**	**2.698.755.892,00**	**5.506.277.499,00**	**8.205.033.391,00**
1	6	1	Dinas Sosial	2.698.755.892,00	5.506.277.499,00	8.205.033.391,00
2			**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**87.033.173.410,00**	**175.021.925.823,25**	**262.055.099.233,25**
2	**1**		**Tenaga Kerja**	**2.354.611.390,00**	**1.461.908.900,00**	**3.816.520.290,00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	2.354.611.390,00	1.461.908.900,00	3.816.520.290,00
2	**2**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**2.263.989.299,00**	**2.118.671.950,00**	**4.382.661.249,00**
2	2	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.263.989.299,00	2.118.671.950,00	4.382.661.249,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1			2	3	4	5
2	**3**		**Pangan**	**2.138.965.444,00**	**1.258.111.155,00**	**3.397.076.599,00**
2	3	1	Dinas Ketahanan Pangan	2.138.965.444,00	1.258.111.155,00	3.397.076.599,00
2	**4**		**Pertanahan**	**-**	**753.650.000,00**	**753.650.000,00**
1	4	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	753.650.000,00	753.650.000,00
2	**5**		**Lingkungan Hidup**	**9.933.946.857,00**	**22.210.157.255,00**	**32.144.104.112,00**
2	5	1	Dinas Lingkungan Hidup	9.933.946.857,00	22.210.157.255,00	32.144.104.112,00
2	**6**		**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**3.566.405.162,00**	**4.348.024.137,00**	**7.914.429.299,00**
2	6	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.566.405.162,00	4.348.024.137,00	7.914.429.299,00
2	**7**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**39.017.996.037,00**	**101.794.570.263,00**	**140.812.566.300,00**
2	7	1	Kecamatan Cakranegara	7.354.046.402,00	18.616.879.090,00	25.970.925.492,00
2	7	2	Kecamatan Sandubaya	5.908.668.498,00	15.971.151.840,00	21.879.820.338,00
2	7	3	Kecamatan Mataram	6.767.274.404,00	17.920.561.680,00	24.687.836.084,00
2	7	4	Kecamatan Selaparang	7.487.829.812,00	17.493.860.583,00	24.981.690.395,00
2	7	5	Kecamatan Ampenan	7.554.360.590,00	19.678.539.960,00	27.232.900.550,00
2	7	6	Kecamatan Sekarbela	3.945.816.331,00	12.113.577.110,00	16.059.393.441,00
2	**8**		**Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana**	**3.517.616.714,00**	**4.950.978.918,00**	**8.468.595.632,00**
2	8	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3.517.616.714,00	4.950.978.918,00	8.468.595.632,00
2	**9**		**Perhubungan**	**6.751.113.179,00**	**20.241.576.404,00**	**26.992.689.583,00**
2	9	1	Dinas Perhubungan	6.751.113.179,00	20.241.576.404,00	26.992.689.583,00
2	**10**		**Komunikasi dan Informasi**	**3.027.785.737,00**	**3.072.877.240,00**	**6.100.662.977,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.027.785.737,00	3.834.877.240,00	6.862.662.977,00
4	01	3	Sekretariat Daerah	-	(762.000.000,00)	(762.000.000,00)
2	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**3.015.377.999,00**	**2.198.767.910,00**	**5.214.145.909,00**
2	11	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.015.377.999,00	2.198.767.910,00	5.214.145.909,00
2	**12**		**Penanaman Modal**	**4.555.713.826,00**	**4.042.799.360,25**	**8.598.513.186,25**
2	12	1	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.555.713.826,00	4.042.799.360,25	8.598.513.186,25
2	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**	**2.667.296.388,00**	**2.698.975.810,00**	**5.366.272.198,00**
2	13	1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.667.296.388,00	2.698.975.810,00	5.366.272.198,00
2	**14**		**Statistik**	**-**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	400.000.000,00	400.000.000,00
2	**15**		**Persandian**	**-**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**
2	10	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	350.000.000,00	350.000.000,00
2	**16**		**Kebudayaan**	**-**	**1.244.350.000,00**	**1.244.350.000,00**
1	1	1	Dinas Pendidikan	-	1.244.350.000,00	1.244.350.000,00
2	**17**		**Perpustakaan**	**-**	**594.718.465,00**	**594.718.465,00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	594.718.465,00	594.718.465,00
2	18		**Kearsipan**	**4.222.355.378,00**	**1.281.788.056,00**	**5.504.143.434,00**
2	18	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.222.355.378,00	1.281.788.056,00	5.504.143.434,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1			2	3	4	5
3			**URUSAN PILIHAN**	**19.552.689.028,00**	**27.698.194.509,00**	**47.250.883.537,00**
3	**1**		**Kelautan dan Perikanan**	**2.469.124.002,00**	**3.657.042.600,00**	**6.126.166.602,00**
3	1	1	Dinas Perikanan	2.469.124.002,00	3.657.042.600,00	6.126.166.602,00
3	**2**		**Pariwisata**	**2.050.898.876,00**	**7.491.162.899,00**	**9.542.061.775,00**
3	2	1	Dinas Pariwisata	2.050.898.876,00	7.491.162.899,00	9.542.061.775,00
3	**3**		**Pertanian**	**9.729.527.537,00**	**6.642.528.510,00**	**16.372.056.047,00**
3	3	1	Dinas Pertanian	9.729.527.537,00	6.642.528.510,00	16.372.056.047,00
3	**6**		**Perdagangan**	**5.303.138.613,00**	**7.531.470.500,00**	**12.834.609.113,00**
3	6	1	Dinas Perdagangan	5.303.138.613,00	7.531.470.500,00	12.834.609.113,00
3	**7**		**Perindustrian**	**-**	**2.280.134.000,00**	**2.280.134.000,00**
1	15	1	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	2.280.134.000,00	2.280.134.000,00
3	**8**		**Transmigrasi**	**-**	**95.856.000,00**	**95.856.000,00**
2	1	1	Dinas Tenaga Kerja	-	95.856.000,00	95.856.000,00
4			**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**179.876.804.428,87**	**168.720.492.795,00**	**348.597.297.223,87**
4	**01**		**Administrasi Pemerintahan**	**39.724.063.454,00**	**79.777.160.161,00**	**119.501.223.615,00**
4	01	1	DPRD	20.700.030.675,00	-	20.700.030.675,00
4	01	2	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	797.839.753,00	-	797.839.753,00
4	01	3	Sekretariat Daerah	14.490.538.833,00	29.503.928.367,00	43.994.467.200,00
4	01	4	Sekretariat DPRD	3.735.654.193,00	50.273.231.794,00	54.008.885.987,00
4	**02**		**Pengawasan**	**4.637.154.210,00**	**7.200.000.000,00**	**11.837.154.210,00**
4	02	1	Inspektorat Kota	4.637.154.210,00	7.200.000.000,00	11.837.154.210,00
4	**03**		**Perencanaan**	**2.997.467.812,00**	**9.421.003.430,00**	**12.418.471.242,00**
4	03	1	Bappeda	2.997.467.812,00	9.421.003.430,00	12.418.471.242,00
4	**04**		**Keuangan**	**106.584.884.264,87**	**63.322.671.553,00**	**169.907.555.817,87**
4	04	1	Badan Keuangan Daerah	37.149.954.694,87	63.322.671.553,00	100.472.626.247,87
			SKPKD	69.434.929.570,00	-	69.434.929.570,00
4	**3**		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**	**23.180.736.964,00**	**6.359.632.991,00**	**29.540.369.955,00**
4	3	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.180.736.964,00	6.359.632.991,00	29.540.369.955,00
4	**4**		**Penelitian dan Pengembangan**	**2.752.497.724,00**	**2.640.024.660,00**	**5.392.522.384,00**
4	4	1	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.752.497.724,00	2.640.024.660,00	5.392.522.384,00
JUMLAH				**614.716.212.377,87**	**978.223.466.326,25**	**1.592.939.678.704,12**

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Mataram TA. 2020

KOREK	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1	2	3	4	5 (3 + 4)
1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**	**229.142.329.185,00**	**86.988.373.774,00**	**316.130.702.959,00**
1.01	UW. Pelayanan Dasar Pendidikan	229.142.329.185,00	85.744.023.774,00	314.886.352.959,00
2.16	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	-	1.244.350.000,00	1.244.350.000,00
1.02.01	**DINAS KESEHATAN**	**43.190.031.726,00**	**47.506.637.708,00**	**90.696.669.434,00**
1.02	UW. Pelayanan Dasar Kesehatan	43.190.031.726,00	47.506.637.708,00	90.696.669.434,00
1.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM**	**20.801.591.740,00**	**320.999.836.080,00**	**341.801.427.820,00**
1.02	UW. Pelayanan Dasar Kesehatan	20.801.591.740,00	320.999.836.080,00	341.801.427.820,00
1.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**8.549.101.727,00**	**94.236.301.090,00**	**102.785.402.817,00**
1,03	UW. Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.549.101.727,00	94.236.301.090,00	102.785.402.817,00
1.04.01	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**5.394.929.609,00**	**38.735.819.585,00**	**44.130.749.194,00**
1,04	UW. Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.394.929.609,00	37.982.169.585,00	43.377.099.194,00
2.04	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	-	753.650.000,00	753.650.000,00
1.05.01	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**7.878.139.582,00**	**4.470.120.434,00**	**12.348.260.016,00**
1.05	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.878.139.582,00	4.470.120.434,00	12.348.260.016,00
1.05.02	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**	**5.609.450.321,00**	**2.663.950.000,00**	**8.273.400.321,00**
1.05	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.609.450.321,00	2.663.950.000,00	8.273.400.321,00
1.05.03	**BAKESBANGPOL**	**2.353.417.016,00**	**4.406.185.679,00**	**6.759.602.695,00**
1.05	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.353.417.016,00	4.406.185.679,00	6.759.602.695,00
1.05.04	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**2.635.798.713,00**	**3.267.351.350,00**	**5.903.150.063,00**
1,04	UW. Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-
1.05	UW. Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.635.798.713,00	3.267.351.350,00	5.903.150.063,00
1.06.01	**DINAS SOSIAL**	**2.698.755.892,00**	**5.506.277.499,00**	**8.205.033.391,00**
1.06	UW. Pelayanan Dasar Sosial	2.698.755.892,00	5.506.277.499,00	8.205.033.391,00

KOREK	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1	2	3	4	5 (3 + 4)
2.01.01	**DINAS TENAGA KERJA**	**2.354.611.390,00**	**1.557.764.900,00**	**3.912.376.290,00**
2.01	UW. Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	2.354.611.390,00	1.461.908.900,00	3.816.520.290,00
3,08	Urusan Pilihan Transmigrasi	-	95.856.000,00	95.856.000,00
2.02.01	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.263.989.299,00**	**2.118.671.950,00**	**4.382.661.249,00**
2.02	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.263.989.299,00	2.118.671.950,00	4.382.661.249,00
2.03.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	**2.138.965.444,00**	**1.258.111.155,00**	**3.397.076.599,00**
2.03	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pangan	2.138.965.444,00	1.258.111.155,00	3.397.076.599,00
2.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**9.933.946.857,00**	**22.210.157.255,00**	**32.144.104.112,00**
2.05	UW. Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	9.933.946.857,00	22.210.157.255,00	32.144.104.112,00
2.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**3.566.405.162,00**	**4.348.024.137,00**	**7.914.429.299,00**
2.06	UW. Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.566.405.162,00	4.348.024.137,00	7.914.429.299,00
2.07.01	**KECAMATAN CAKRANEGARA**	**7.354.046.402,00**	**18.616.879.090,00**	**25.970.925.492,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.354.046.402,00	18.616.879.090,00	25.970.925.492,00
2.07.02	**KECAMATAN SANDUBAYA**	**5.908.668.498,00**	**15.971.151.840,00**	**21.879.820.338,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.908.668.498,00	15.971.151.840,00	21.879.820.338,00
2.07.03	**KECAMATAN MATARAM**	**6.767.274.404,00**	**17.920.561.680,00**	**24.687.836.084,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.767.274.404,00	17.920.561.680,00	24.687.836.084,00
2.07.04	**KECAMATAN SELAPARANG**	**7.487.829.812,00**	**17.493.860.583,00**	**24.981.690.395,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.487.829.812,00	17.493.860.583,00	24.981.690.395,00
2.07.05	**KECAMATAN AMPENAN**	**7.554.360.590,00**	**19.678.539.960,00**	**27.232.900.550,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.554.360.590,00	19.678.539.960,00	27.232.900.550,00
2.07.06	**KECAMATAN SEKARBELA**	**3.945.816.331,00**	**12.113.577.110,00**	**16.059.393.441,00**
2.07	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.945.816.331,00	12.113.577.110,00	16.059.393.441,00
2.08.01	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**3.517.616.714,00**	**4.950.978.918,00**	**8.468.595.632,00**
2.08	UW. Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.517.616.714,00	4.950.978.918,00	8.468.595.632,00

KOREK	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1	2	3	4	5 (3 + 4)
2.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**	**6.751.113.179,00**	**20.241.576.404,00**	**26.992.689.583,00**
2.09	UW. Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	6.751.113.179,00	20.241.576.404,00	26.992.689.583,00
2.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.027.785.737,00**	**4.584.877.240,00**	**7.612.662.977,00**
2.10	UW. Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	3.027.785.737,00	3.834.877.240,00	6.862.662.977,00
2.14	UW. Bukan Pelayanan Dasar Statistik	-	400.000.000,00	400.000.000,00
2.15	UW. Bukan Pelayanan Dasar Persandian	-	350.000.000,00	350.000.000,00
2.11.01	**DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**3.015.377.999,00**	**4.478.901.910,00**	**7.494.279.909,00**
2.11	UW. Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.015.377.999,00	2.198.767.910,00	5.214.145.909,00
3,07	Urusan Pilihan Perindustrian	-	2.280.134.000,00	2.280.134.000,00
2.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**	**4.555.713.826,00**	**4.042.799.360,25**	**8.598.513.186,25**
2.12	UW. Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	4.555.713.826,00	4.042.799.360,25	8.598.513.186,25
2.13.01	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**2.667.296.388,00**	**2.698.975.810,00**	**5.366.272.198,00**
2.13	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga	2.667.296.388,00	2.698.975.810,00	5.366.272.198,00
2.18.01	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**4.222.355.378,00**	**1.876.506.521,00**	**6.098.861.899,00**
2,17	UW. Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	-	594.718.465,00	594.718.465,00
2,18	UW. Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	4.222.355.378,00	1.281.788.056,00	5.504.143.434,00
3.01.01	**DINAS PERIKANAN**	**2.469.124.002,00**	**3.657.042.600,00**	**6.126.166.602,00**
3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	2.469.124.002,00	3.657.042.600,00	6.126.166.602,00
3.02.01	**DINAS PARIWISATA**	**2.050.898.876,00**	**7.491.162.899,00**	**9.542.061.775,00**
3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	2.050.898.876,00	7.491.162.899,00	9.542.061.775,00
3.03.01	**DINAS PERTANIAN**	**9.729.527.537,00**	**6.642.528.510,00**	**16.372.056.047,00**
3,03	Urusan Pilihan Pertanian	9.729.527.537,00	6.642.528.510,00	16.372.056.047,00
3.04.01	**DINAS PERDAGANGAN**	**5.303.138.613,00**	**7.531.470.500,00**	**12.834.609.113,00**
3.04	Urusan Pilihan Perdagangan	5.303.138.613,00	7.531.470.500,00	12.834.609.113,00
4.01.01	**DPRD**	**20.700.030.675,00**	**-**	**20.700.030.675,00**
4,01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	20.700.030.675,00	-	20.700.030.675,00

KOREK	URUSAN/ SKPD/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL APBD
1	2	3	4	5 (3 + 4)
4.01.02	**KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH**	**797.839.753,00**	**-**	**797.839.753,00**
4,01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	797.839.753,00	-	797.839.753,00
4.01.03	**SEKRETARIAT DAERAH**	**14.490.538.833,00**	**28.741.928.367,00**	**43.232.467.200,00**
4,01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	14.490.538.833,00	29.503.928.367,00	43.994.467.200,00
4.01.04	**SEKRETARIAT DPRD**	**3.735.654.193,00**	**50.273.231.794,00**	**54.008.885.987,00**
4,01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	3.735.654.193,00	50.273.231.794,00	54.008.885.987,00
4.02.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**4.637.154.210,00**	**7.200.000.000,00**	**11.837.154.210,00**
4,02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	4.637.154.210,00	7.200.000.000,00	11.837.154.210,00
4.03.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.997.467.812,00**	**9.421.003.430,00**	**12.418.471.242,00**
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	2.997.467.812,00	9.421.003.430,00	12.418.471.242,00
4.04.01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**	**37.149.954.694,87**	**63.322.671.553,00**	**100.472.626.247,87**
4,04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	37.149.954.694,87	63.322.671.553,00	100.472.626.247,87
4,05,01	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**	**23.180.736.964,00**	**6.359.632.991,00**	**29.540.369.955,00**
4,05	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	23.180.736.964,00	6.359.632.991,00	29.540.369.955,00
4,07,01	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**2.752.497.724,00**	**2.640.024.660,00**	**5.392.522.384,00**
4,07	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	2.752.497.724,00	2.640.024.660,00	5.392.522.384,00
J U M L A H		**614.716.212.377,87**	**978.223.466.326,25**	**1.592.939.678.704,12**

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pada TA. 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta telah disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah; Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/512/ORG perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/721/ORG perihal Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat; dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
   1. Dinas Pendidikan
   2. Dinas Kesehatan
   3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   5. Satuan Polisi Pamong Praja
   6. Dinas Pemadam Kebakaran
   7. Dinas Sosial

B. Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu:
   8. Dinas Tenaga Kerja
   9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   10. Dinas Ketahanan Pangan
   11. Dinas Lingkungan Hidup
   12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   13. Kecamatan Cakranegara
   14. Kecamatan Sandubaya
   15. Kecamatan Mataram
   16. Kecamatan Selaparang
   17. Kecamatan Ampenan
   18. Kecamatan Sekarbela
   19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   20. Dinas Perhubungan
   21. Dinas Komunikasi dan Informatika
   22. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   24. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
   25. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

C. Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu:
   26. Dinas Kelautan dan Perikanan
   27. Dinas Pariwisata
   28. Dinas Pertanian
   29. Dinas Perdagangan

D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yaitu:
   30. Sekretariat Daerah
   31. Sekretariat DPRD
   32. Inspektorat Daerah
   33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   34. Badan Keuangan Daerah
   35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
   36. Badan Penelitian dan Pengembangan

Selain Perangkat Daerah diatas, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS Tahun 2020, yaitu:

1. Rumah Sakit Umum Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menggambarkan alokasi plafon anggaran sementara Belanja Langsung berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan organisasi beserta alokasinya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Langsung**
berdasarkan Program dan Kegiatan di Kota Mataram TA. 2020

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				**606.782.853.199**				**499.872.356.738**	
1.01	**Pendidikan**				**85.744.023.774**				**94.126.637.123**	
1.01 - 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase ruang belajar PAUD dalam kondisi baik	%	80,74				81		Dinas Pendidikan
		Persentase angka kelulusan, dan angka melanjutkan	%	100				100		
		Persentase operasional sekolah tingkat PAUD yang berjalan baik	%	85				85		
1.01 - xx	Pendidikan Non Formal	Persentase ruang belajar TK dan SKB dalam kondisi baik	%	95				100		
1.01 - 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	% Ruang belajar dalam kondisi baik	%	78				80		
		Persentase siswa tidak mampu yang mendapat pendidikan dasar	%	100				100		
		Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	%	100				100		Dinas Pendidikan
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	%	75				75		
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	%	63				65		
		Angka Melanjutkan SD	%	93				95		
1.01 - 18	Program Pendidikan Non Formal	% peserta ujian paket A dan atau B yang mendapat ijazah	%	100				100		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01 - 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV, % Guru tersertifikasi	%	98				98		
1.01 - 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah terakreditasi minimal B	%	95				100		
1.01 - 23	Program Sekolah (Dana BOS)	Persentase sekolah tingkat pendidikan dasar yang mendapat dana BOS	%	100				100		
1.02	**Kesehatan**				**368.506.473.788**				**215.865.479.000**	
1.02 - 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	%	100				100		Dinas Kesehatan
		% Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif	%	100				100		
1.02 - 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Persentase PHBS pada tatanan Rumah tangga	%	55				60		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100				100		
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100				100		
		Cakupan Posyandu Aktif	%	50				50		
1.02 - 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	% Balita gizi buruk yang ditangani	%	100				100		Dinas Kesehatan
1.02 - 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	% masyarakat yang mengakses jamban keluarga	%	88				90		Dinas Kesehatan
		% masyarakat yang mengakses air bersih	%	88				90		
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	%	100%				100%		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga	%	100%				100%		
1.02 - 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas/ UPT dengan kondisi gedung baik	Unit	11				11		Dinas Kesehatan
		Jumlah Pustu dengan Kondisi Gedung Baik	Unit	17				17		
		Jumlah Poskesdes dengan Kondisi Baik	unit	19				23		
1.02 - 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	% TPM yang diperiksa dan dibina	%	78%				80%		Dinas Kesehatan
1.02 - 35	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Cakupan dokter umum terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	92,4				92,4		RSUD Kota Mataram
		Cakupan dokter Spesialis terhadap pemenuhan pelayanan medis	%	100				100		RSUD Kota Mataram
		Respon time pelayanan Emergency call 119	menit	20 menit				15 menit		
		(WU) Persentase inovasi pelayanan yang berjalan baik	%	100				100		
		Jumlah target pendapatan RS	%							
		Indeks Kepuasan Pelayanan Homecare	indeks	10				12		
		Persentase pengaduan ketersediaan tempat tidur	%	30%				0%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pengaduan yang diselesaikan	%	100%				100%		RSUD Kota Mataram
		Cost Recorvery Ratio (CRR)	%	82%				82%		
		Rata-rata waktu antri pendaftaran	jam	2 jam				2 jam		
		waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi b. Racikan (SPM Farmasi)	menit menit	30 menit 60				30 menit 60		
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rasio perawat terhadap tempat tidur	Perawat per Bed	1 perawat/ 3 bed (rawat inap)				1 perawat/ 3 bed (rawat inap)		RSUD Kota Mataram
		Cakupan Tenaga dan Pelayanan Instalasi Penunjang sesuai standar	%	100				100		
		(WU) Persentase SDM yang mendapat pelatihan kompetensi pelayanan	%	90				100		
		Cakupan pemenuhan administrasi serta Rumah Sakit terhadap standar akreditasi sarana dan prasarana umum Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	83				85		
		Cakupan pemenuhan standar SDM Rumah Sakit terhadap standar akreditasi	%	100				100		
1.02 - 37	Program Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan	% ketersediaan Obat Generik	%	1				1		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% ketersedian alat kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya	%	0,6				0,7		
1.02 - 38	Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	99				100		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Nifas	%	95				100		
		Cakupan Kesehatan Ibu Bersalin	%	95				100		
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	93				95		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan peduli remaja	%	100				100		
		Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi essensial terpadu	%	100				100		
		cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96				100		Dinas Kesehatan
		cakupan kunjungan neonatal lengkap	%	99				100		
		cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	80				85		
		cakupan pelayanan anak balita	%	95				100		
		cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	85				100		
1.02 - 39	Program Pengendalian Penyakit	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95%				95%		Dinas Kesehatan
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	90%				100%		
		cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	97%				100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penderita diare yang ditangani	%	100%				100%		
		Cakupan balita pnemonia yang ditangani	%	100%				100%		
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%				100%		Dinas Kesehatan
		% Calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya	%	100%				100%		
		% Penderita DBD yang ditangani	%	100%				100%		
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	85%				100%		
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100%				100%		
		Cakupan kpelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	%	100%				100%		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	90%				100%		
1.02 - 40	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	% Tenaga Kesehatan Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)	%	100%				100%		Dinas Kesehatan
1.02 - 41	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar Pasien Masyarakat Miskin	%	100%				100%		Dinas Kesehatan
		Puskesmas yang terakreditasi	unit	11				11		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02 - 42	Program Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan	Jumlah sarana penunjang pelayanan kesehatan	unit	2				2		Dinas Kesehatan
1.02 - 43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	% Puskesmas yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100%				100%		Dinas Kesehatan
1.03	**Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**				**94.236.301.090**				**143.365.000.000**	
1.03 - 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jaringan jalan yang berfungsi sesuai umur teknis	%	85%				86%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 - 16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	92				95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 - 18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara	%	22%				24%		
1.03 - 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	70%				80%		
1.03 - 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase KK MBR yang terlayani air minum	%	71,3				71,91		
		Persentase KK MBR yang memiliki akses pengolahan air limbah	%	43,72				44,32		
1.03 - 28	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	%	70				75		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03 - 32	Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	95				100		
1.03 - 41	Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Publik	Persentase Bangunan Yang Memenuhi Standar Bangunan Gedung	%	10				13		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03 - 43	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	51%				55%		
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				**37.982.169.585**				**34.342.948.800**	
1.04 - 15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	99				100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 - 21	Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Yang Tertata	%	86				100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04 - 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang terpelihara	%	24				24		
1.05	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				**14.807.607.463**				**7.707.291.815**	
1.05 - xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP yang tersertifikasi	%	95%				100%		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase lingkungan yang aman tertib bersih indah dan mandiri	%	90%				95%		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05 - 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Potensi Konflik ditindaklanjuti	%	100%				100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kejadian Konflik yang tertangani	%	100%				100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penduduk menggunakan hak pilih pada pemilu tingkat daerah	%	100%				100%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 - 24	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase tertanganinya kasus-kasus pelanggaran Perda	%	90%				90%		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 - 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	Persen	24%				50%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 - 33	Program Peningkatan Kesiagaan Penanganan Kebakaran	Respone Time	menit	17 menit				15 menit		Dinas Pemadam Kebakaran
1.05 - 34	Program Peningkatan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Kelurahan rawan kebakaran	%	4%				2%		Dinas Pemadam Kebakaran
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana tertangani	Persen	100%				100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemulihan Pasca Bencana Alam	Persentase pemulihan pasca kejadian bencana sesuai jadwal rehab rekon	Persen	100%				100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.06	**Sosial**				**5.506.277.499**				**4.465.000.000**	
1.06 - 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penanganan	%	60,16%				70,17%	980.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PRSE yang mendapatkan penanganan	%	0.65				0.81	100.000.000	Dinas Sosial
		Persentase informasi program penanganan PMKS	%	100				100	505.000.000	Dinas Sosial
		Persentase penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana alam/ sosial sesuai SOP	%	100				100	200.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 17	Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	3,67%				4,20%	950.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Persentase PMKS lanjut usia (lansia) yang ditangani	%	4,48%				4,85%	170.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mengalami perubahan prilaku	%	4,35				4,79	315.000.000	Dinas Sosial
1.06 - 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan kasus yang ditangani oleh LK3	%	100%				100%		Dinas Sosial
		Persentase LKS yang memenuhi standar layanan	%	100%				100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemberdayaan bagi Karang Taruna dan PSM	%	35,03				41,4		
1.06 - 22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase satuan petugas bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	%	100				100		Dinas Sosial
1.06 - 24	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase janda pahlawan, veteran dan janda veteran yang mendapatkan santunan	%	50				58,33		Dinas Sosial
		Persentase CSR yang tersalurkan untuk PMKS	%	100				100		
		Persentase penyaluran bantuan sosial bagi penerima PKH	%	100				100		
1.06 - 25	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lingkungan rawan konflik yang aktif menjalankan program keserasian sosial	%	100				100		Dinas Sosial
1.06 - 26	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Korban Narkotika	Persentase penanganan penyandang disabilitas dan korban NAPZA	%	15,81				17,09		Dinas Sosial
1.06 - 28	Program Jaminan Sosial Keluarga	Persentase verifikasi data PBI JKN	%	100				100		Dinas Sosial
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**				**175.021.925.823,25**				**43.160.181.221**	
2.01	**Tenaga Kerja**				**1.461.908.900**				**1.391.397.750**	
2.01 - 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	100				100		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.01 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja	%	100				100		Dinas Tenaga Kerja
2.01 - 20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Lowongan kerja yang tersedia		1250				1250		Dinas Tenaga Kerja
		Persentase lulusan pelatihan tenaga kerja mandiri	%	100				100		
2.01 - 21	Program Peningkatan Kesempatan Kerja ke Luar Negeri	Persentase CTKI/CTKW yang dikirm	%	100				100		Dinas Tenaga Kerja
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**2.118.671.950**				**3.710.390.498**	
2.02 - xx	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Persentase jumlah OPD yang memiliki komitmen kesepahaman tentang PUG	%	33				44		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Perangkat Daerah yang memenuhi 7 prasyarat PUG	%	33,33				44,44		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		% OPD yang melaksanakan PPRG	%	88,89				100		
2.02 - 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan layanan perlindungan khusus	%	100%				100%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Data kekerasan terpilah gender	dokumen	2 (lapo ran simphony dan Dinas)				2 (lapo ran simphony dan Dinas)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan pembinaan kelompok Perempuan kepala keluarga (Pekka) dan Korban KDRT rawan ekonomi	%	6				6		
		Persentase Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang aktif	%	57				57		
2.02 - 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	frekuensi	12 kali				12 kali		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02 - 20	Program Pengarusutamaan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang pro aktif dalam pengembangan KLA	%	100				100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Forum Anak yang aktif	%	57 Forum Anak				57 Forum Anak		
2.03	**Pangan**				**1.258.111.155**				**515.000.000**	
2.03 - 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein serta Penguatan Cadangan Pangan	%	160				175		Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	%	15				20		
		Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Akses Pangan	%	100				100		
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100				100		
		Penanganan Rawan Pangan	%	100				100		
2.03 - xx	Peningkatan diversifikasi/ Penganekaragaman Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	skor	96				98		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pangan	%	100%				100%		Dinas Ketahanan Pangan
2.04	**Pertanahan**				**753.650.000**				**753.650.000,00**	
2.04 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah fasus fasum lahan permukiman	buah	10				10		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.05	**Lingkungan Hidup**				**22.210.157.255**				**1.600.000.000**	
2.05 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	100				100		Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	IKA: 37,10 dan IKU:83,15				IKA: 37,20 dan IKU:83,20		Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase perusahaan dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan memiliki izin pengelolaan limbah cair (IPLC)	%	7				8		Dinas Lingkungan Hidup
2.05 - 19	Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus pengaduan LH	%	100				100		Dinas Lingkungan Hidup
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**4.348.024.137**				**579.715.720**	
2.06 - 15	Pendaftaran dan Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KTP-el	%	100%				100%		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.06 - xx	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Tingkat akurasi/ keabsahan data dokumen administarsi kependudukan	%	100%				100%		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
2.06 - xx	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	100%				100%		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	%	100%				100%		
		Cakupan kepemilikan dokumen perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian	%	100%				100%		
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**101.794.570.263**				**3.033.129.741**	
2.07 - 22	Program peningkatan dan pengembangan manjemen pembangunan partisipatif	Persentase kelurahan yang terseleksi	%	100				100		Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 23	Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	IKM Kecamatan	Nilai IKM	100				100		Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase indikator pelayanan Kecamatan berkriteria baik (nilai 80)	%							
2.07 - 25	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase pelayanan adm. Kependudukan tepat waktu	%	100				100		Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 26	Program Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyaraka tan yang berkinerja baik	%	0				0		Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase Kelurahan yang tertib administrasi	%	100				100		
		Persentase UMKM terverifikasi	%	100				100		
		Persentase capaian PBB	%	0				0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kegiatan keagamaan yang terfasiitasi	%	80				100		
		Persentase karang taruna aktif	%	80				100		
		Persentase kader PKK aktif	%	80				100		Kecamatan se Kota Mataram
		Persentase pelayanan terhadap kelembagaan masyarakat	%	80				100		
		Persentase keterwakilan unsur masyarakat pada MPBM (Unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Kader)	%	80				100		
2.07 - 29	Program Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Persentase konflik sosial ditindaklanjuti	%	100				100		Kecamatan se Kota Mataram
2.07 - 31	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan berbasis lingkungan	Persentase sampah yang tertangani	%	100				100		Kecamatan se Kota Mataram
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**4.950.978.918**				**5.508.025.062**	
2.08 - 15	Program Keluarga Berencana (KB)	Tingkat kepesertaan ber KB	%	78,38				78,92		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	0,07				0,05		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.08 - xx	Program Kependudukan	Angka Kelahiran remaja usia 15-19 thn	%	0,12				0,1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rata-Rata Usia Kawin pertama Perempuan	tahun	22,19				22,49		
2.08 - xx	Program Pembangunan Keluarga	Cakupan poktan yang diberdayakan disetiap Kelurahan	%	100				100		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	**Perhubungan**				**20.241.576.404**				**7.465.311.041**	
2.09 - 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum	%	43%				48%		Dinas Perhubungan
2.09 - 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prosentase Penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan angkutan	%	-5%				-5%		Dinas Perhubungan
2.09 - 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan rasio kendaraan uji	%	66%				68%		Dinas Perhubungan
2.09 - 21	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Persentase tingkat kepatuhan dan ketertiban pelayanan parkir	%	61%				64%		Dinas Perhubungan
2.09 - 22	Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Peningkatan level pelayanan jalan	level	Level B (0.33)				Level B (0.28)		Dinas Perhubungan
2.10	**Komunikasi dan Informatika**				**3.072.877.240**				**8.350.000.000**	
2.10 - 24	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Prosentase Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100%				100%		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10 - xx	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Sistem Informasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	44%				46%		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.11	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**				**2.198.767.910**				**1.634.894.467**	
2.11 - 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	% Pertumbuhan UKM	%	80				90		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11 - 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah wira usaha baru	wub	3000				3100		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah produk UKM yang terstandar	UKM	75				80		
2.11 - 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	unit	483				507		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Koperasi berkualitas	unit	116				127		
2.12	**Penanaman Modal**				**4.042.799.360,25**				**3.021.489.850**	
2.12 - 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investasi	PMA; PMDN	90 PMDN; 35 PMA				100 PMDN; 40 PMA		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Investor Aktif	%	60				65		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 18	Program Penanaman Modal	Target Investasi	Miliar Rupiah	1500				1500		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12 - 20	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan	Persentase Pengaduan terselesaikan	%	96				97		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase penyelesaian izin Pembangunan Sarana Prasarana Perkotaan sesuai SOP	%	91				91		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12 - 22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian izin Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai SOP	%	91				91		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**				**2.698.975.810**				**700.989.300**	
2.13 - 15	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Persentase Organisasi Pemuda yang Memiliki Dokumen AD/ART	%	80%				86%		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif di OKP	%	1,03%				1,11%		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase pemuda yang aktif dan mandiri	%	66,60%				70%		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.13 - 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Persentase pelatih yang memiliki sertifikat atau lisensi pelatih	%	66,6667				100		Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13 - 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Perolehan Prestasi Olahraga unggulan	Medali emas, perak dan perunggu	emas ; 8 Perak: 9 Perunggu ; 4				emas ; 9 Perak: 10 Perunggu ; 5		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.14	**Statistik**				**400.000.000**				**390.595.250**	
2.14 - 15	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio Update Data Sektoral di masing-masing OPD	%	100				100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15	**Persandian**				**350.000.000**				**750.000.000**	
2.15 - 16	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	level	level I				level II		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Teknologi	level	level I				level II		
		Indeks Penanggulangan Pemulihan	level	level I				level II		
		Indeks Tata Kelola Keamanan Informasi	level	level I				level II		
		Indeks Kerangka Kerja Keamanan Infomasi	level	level I				level II		
		Indeks Pengelolan Risiko Keamanan Infomasi	level	level I				level II		
2.16	**Kebudayaan**				**1.244.350.000**				**2.453.142.481**	
2.16 - 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	% Siswa duta budaya yang aktif	%	35				35		Dinas Pendidikan
2.16 - 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya lokal yang terinventarisasi	94	98				100		Dinas Pendidikan
		% sanggar seni yang menerima aspresiasi	30	35				35		
2.17	**Perpustakaan**				**594.718.465**				**530.099.142**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17 - 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Per Tahun	Orang	33660				34372		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 - 16	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Daerah	Persentase bahan pustaka yang terpelihara	%	100				100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18	**Arsip**				**1.281.788.056**				**758.047.063**	
2.18 - 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase arsip yang terestorasi	%							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18 - 19	Program Pembinaan SDM, Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan	Jumlah Arsiparis yang bersertifikat.	orang	35				38		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	**Urusan Wajib Pilihan**				**27.698.194.509**				**33.977.935.154**	
3.01	**Kelautan dan Perikanan**				**3.657.042.600**				**2.474.311.000**	
3.01 - 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Masyarakat pesisir yang terlatih	orang	30				60		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 - 20	Program pengembangan budidaya perikanan	% peningkatan produksi perikanan budidaya	%	98%				98%		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.01 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap	%	95%				95%		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	% kualitas pengolahan hasil perikanan	%							Dinas Kelautan dan Perikanan
3.02	**Pariwisata**				**7.491.162.899**				**4.415.000.000**	
3.02 - 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	8				8		Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yg aktif di kepariwisataan	%	5				5		
3.02 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata yang sesuai standar pelayanan	%	100				100		Dinas Pariwisata
		Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan	%	6,5				6,5		Dinas Pariwisata
		Persentase destinasi wisata dalam Kondisi Baik	%	100				100		Dinas Pariwisata
3.02 - 17	Program pengembangan Kemitraan	Persentase Pelaku Pariwisata binaan	%	2				2		Dinas Pariwisata
		Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata	%	6,5				6,5		
3.03	**Pertanian**				**6.642.528.510**				**5.790.000.000**	
3.03 - xx	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Produktivitas tanaman pangan per hektar (kw/ha)								Dinas Pertanian
		- Padi	Kw/Ha	72,00 Kw/Ha				75,00 Kw/Ha		
		- Kedelai	Kw/Ha	9.50 Kw/Ha				10.00 Kw/Ha		
		- Jagung		62.00 Kw/Ha				63.00 Kw/Ha		
		Persentase Luasan hortikultura	%	17%				16%		
3.03 - 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	jumlah olahan	jenis	22				26		Dinas Pertanian
3.03 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase kelompok tani kelas madya keatas	%	25%				25%		Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.03 - 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus kematian hewan ternak	%	10%				10%		Dinas Pertanian
3.03 - 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Ternak								Dinas Pertanian
		- Ternak besar	ekor	2600				2625		
		- Ternak kecil	ekor	3250				3500		
		- Unggas	ekor	135000				135500		
3.03 - 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase Peningkatan PAD RPH dan Pasar Hewan	%	20%				20%		Dinas Pertanian
3.03 - 26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan kelompok tani terlayani sarana dan prasana pertanian	%	80				96		Dinas Pertanian
3.06	**Perdagangan**				**7.531.470.500**				**20.307.231.604**	
3.06 - 15	Program Pengamanan perdagangan Menuju Tertib Ukur	% Realisasi PAD Kemetrologian yang dicapai	%	100				100		Dinas Perdagangan
		Jumlah Alat UTTP yang ditera/Tera Ulang	Unit	12840				12840		
3.06 - 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah jenis produk unggulan yang menjadi komoditas ekspor	jenis	4				4		Dinas Perdagangan
3.06 - 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	% pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%	46,63				47,95		Dinas Perdagangan
		% pasar dalam kondisi baik atau layak	%	89,47				100		
3.06 - 19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	% PKL yang meningkat usaha perdagangan-nya	%	47				55		Dinas Perdagangan
		Jumlah TDU yang diterbitkan	TDU	30				30		
3.06 - 20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	Jumlah Realisasi PAD Pasar yang dicapai	%	99				99		Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.06 - 21	Program Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Persentase laju harga barang pokok	%	97.50				98		Dinas Perdagangan
3.07	**Perindustrian**				**2.280.134.000**				**991.392.550**	
3.07 - 16	Pengembangan Industri Kecil Menengah	% pertumbuhan IKM	%	5,13				5,39		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah produk IKM yang bersertifikat	produk	100				100		
3.07 - 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menggunakan teknologi Industri	%	80				80		
3.08	**Transmigrasi**				**95.856.000**				**95.856.000,00**	
3.08 - 18	Program Penempatan Calon Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang dibina	%	80				100		Dinas Tenaga Kerja
4	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				**168.720.492.795**				**80.703.221.961**	
4.01	**Administrasi Pemerintahan**				**79.777.160.161**				**48.252.245.000**	
4.01 - 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase usulan perda inisiatif yang terfasilitasi naskah akademik	%	100				100		
		Persentase rapat paripurna yang terdokumentasi	%	100				100		
		Persentase anggota dewan yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100				100		
		Persentase produk hukum tersosialisasi	%	90				90		
		Indeks kepuasan kunjungan kerja	%	80				80		
4.01 - 17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan kunjungan kerja luar daerah	%	100				100		Bagian Humas dan Protokol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01 - 19	Program Peningkatan Capaian Kinerja	Persentase OPD dengan Nilai LPPD Tinggi	%	100				100		Bagian Tata Pemerintahan
		Persentase Laporan Kinerja Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	%	100				100		
4.01 - 20	Program pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase kelurahan dengan kriteria cepat berkembang	%	20				20		Bagian Tata Pemerintahan
4.01 - xx	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	Indeks	100				100		Sekretariat Daerah
4.01 - 22	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	Indeks	100				100		Bagian Humas dan Protokol
4.01 - 23	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan	Persentase Jumlah Hibah yang tepat sasaran	%	100%				100%		Bagian Bina Kesejahtera-an Rakyat
4.01 - 26	Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Perda yang sesuai dengan perundang-undangan (tidak dibatalkan)	%	100				100		Sekretariat Daerah
4.01 - 27	Program Penataan Ketatalaksanaan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	%	80				85		Bagian Organisasi
4.01 - 28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun standar pelayanan	%	80				90		Bagian Organisasi
4.01 - 29	Program Penataan Daerah, Organisasi, dan Ketatalaksanaan serta PAN	Persentase OPD yang berdasarkan analisis kelembagaan telah sesuai standar Right Sizeing	%	15,38				23,08		Bagian Organisasi
		Persentase jabatan dengan analisis beban kerja	%	18				18		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase jabatan dengan uraian jabatan	%	18				18		
4.01 - 35	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang outputnya selesai	%	100%				100%		Sekretariat Daerah
4.01 - 36	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang/ jasa pemerintah (PBJP) melalui e-procurement	%	100%				100%		Bagian Layanan Pengadaan
4.01 - 37	Program Pembinaan Administrasi Pertanahan	Persentase Tanah Bersertifikat	%	0				0		Bagian Tata Pemerintahan
4.01 - 38	Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang menggunakan SSH dalam penyusunan anggaran	%	100%				100%		Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama
		Persentase OPD yang menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran	%	100%				100%		
		Persentase Laporan realisasi fisik OPD tepat waktu	%	100%				100%		
4.01 - 41	Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Lokal	Persentase BUMD yang akuntabel	%	100%				100%		Bagian Perekono-mian
	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement	%	100%				100%		Bagian Layanan Pengadaan
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase liputan kegiatan KDH & WKDH yang menjadi bahan publikasi	%	100%				100%		Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02	**Pengawasan**				**7.200.000.000**				**2.119.814.125**	
4.02 - 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang diaudit/bina APIP	%	18,5				18,5		Inspektorat Daerah
		Persentase obrik yang mempunyai hasil pemeriksaan internal	%	20				20		
		Persentase OPD yang hasil revieu laporan keuangannya telah sesuai SAP	%	100				100		
		Persentase OPD yang hasil revieu sakipnya mendapat nilai B	%	82				83		
		Persentase obrik yang diaudit oleh pemeriksa eksternal	%	19,5				19,5		
4.02 - 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase unsur Maturitas SPIP yang harus dipenuhi	%	100				100		Inspektorat Daerah
		Persentase elemen kapabilitas APIP yang harus dipenuhi	%	100				100		
		Persentase APIP pada Inspektorat Kota Mataram yang Memiliki standar Kompotensi	%	100				100		
4.02 - 17	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Regulasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan pada inspektorat Kota Mataram	regulasi	3				4		Inspektorat Daerah
4.03	**Perencanaan**				**9.421.003.430**				**8.070.683.410**	
4.03 - 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	70%				80%		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
		Persentase program dan kegiatan dalam RKPD yang tertuang dalam APBD	%	95%				100%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.03 - 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Ekonomi	%	100%				100%		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Sosial Budaya	%	100%				100%		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi target indicator kinerja antar dokumen perencanaan SKPD koordinasi Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	%	100%				100%		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 26	Program Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	98				100		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 27	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	SKPD koordinasi Bidang Ekonomi yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	95				100		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	SKPD koordinasi bidang Sosial Budaya yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	95				100		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah
4.03 - 29	Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase urusan pemerintahan yang capaian kinerjanya berkriteria baik dan sangat baik	%	98%				100%		Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04	**Keuangan**				**63.322.671.553**				**12.359.246.325**	
4.04 - 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	%	82				85		Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah menyusun Anggaran Satuan Kerja tepat waktu	%	100%				100%		
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100				100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran yang telah ditetapkan	%	100				100		
		% ASN yang terbina dan memahami materi pelatihan	%							
		% Pelaksanaan Tender tepat waktu	%							
		% implementasi SSH dalam penyusunan RKA perangkat daerah	%							
4.04 - 16	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	Persentase Hasil Evaluasi dan Pelaporan PAD	%	100				100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah yang Ditndaklanjuti sesuai SOP	%	100				100		
		Persentase Unit Kerja Penghasil PAD yang Mencapai Target PAD	%	79				86		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	%	100				100		
4.04 - 17	Program Pendataan, Perhitungan Penetapan dan Pengolahan Data	Persentase Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Daerah	%	100				100		Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Penetapan Pajak Daerah yang Dilaksanakan sesuai SOP	%	100				100		
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis IT	%	100%				100		
4.04 - 18	Program Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Penagihan Pajak Daerah yang Ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100%				100%		Badan Keuangan Daerah
		Persentase Pelayanan permohonan wajib pajak daerah yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100%				100%		Badan Keuangan Daerah
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti tepat waktu	%	100%				100%		Badan Keuangan Daerah
4.04 - 19	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Usulan Sertifikat yang Dilimpahkan ke BPN	%	41,14				43,38		Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi BMD tepat waktu	%	100				100		
		Persentase Penyediaan/ Pengembangan sistem Pengelolaan Aset Daerah	%	100				100		
		Persentase BMD yg Sudah diinventarisasi atau Up date BMD	%	90				90		
4.04 - 20	Program Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	%	100				100		Badan Keuangan Daerah
		Persentase OPD yang Telah Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tapat Waktu	%	100				100		Badan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase OPD yang telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu	%	100%				100%		
4.05	**Kepegawaian**				**6.359.632.991**				**7.189.845.851**	
4.05 - 15	Program Pendidikan Kedinasan	% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	%	68%				71%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.05 - 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	%	90%				90%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		% pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi teknis	%	2%				2%		
		%Persentase PNS yang memiliki Pendidikan S1, S2 dan S3	%	65%				66%		
4.05 - 32	Program Mutasi dan Pembinaan Pegawai	Persentase Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	97%				97		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Tata Usaha Kepegawaian yang Tepat Waktu	%	97%				97		
4.05 - xx	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Jabatan Stuktural	%	85%				90%		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur Sesuai Formasi	%	88%				89%		
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**				**2.640.024.660**				**2.711.387.250**	
4.07 - 16	Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	100				100		Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020			Catatan Penting	Tahun 2021		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan SDA, Sarana/ Prasarana dan Wilayah	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	100				100		Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Program penelitian dan pengembangan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase hasil kelitbangan yang di manfaatkan	%	100				100		Badan Penelitian dan Pengembangan
4.07 - xx	Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Penunjang Kelitbangan	Persentase Hasil Kajian yang memenuhi standar mutu	%	100				100		Badan Penelitian dan Pengembangan

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2020 direncanakan sebesar **Rp. 614.716.212.377,87;** yang dialokasikan untuk:

- *Belanja pegawai*, direncanakan sebesar **Rp. 545.281.282.807,87;** dengan memperhatikan penganggaran yang disesuaikan dengan arah kebijakan belanja tidak langsung TA. 2020.
- *Belanja Hibah* tahun 2020 direncanakan sebesar **Rp. 56.746.690.000,00**; anggaran tersebut dialokasikan untuk: (i) belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 200.000.000,00; (ii) belanja hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi sebesar Rp. 49.983.690.000,00; (iii) belanja hibah dana BOP PAUD sebesar Rp. 5.835.000.000,00; dan (iv) belanja hibah dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebesar Rp.728.000.000,00.
- *Belanja Bantuan Sosial* tahun 2020 direncanakan sebesar **Rp. 6.330.743.850,00**; alokasi tersebut direncanakan untuk: (i) belanja bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 3.459.383.850,00; (ii) Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi sebesar Rp.2,061,360,000.00; (iii) Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00.

  Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga-lembaga dan organisasi tersebut berdasarkan proposal yang diterima pada tahun 2019. Adapun, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- *Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa* tahun 2020 direncanakan sebesar **Rp. 2.357.495.720,00** yang direncanakan untuk : (i) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi NTB

sebesar Rp. 1.351.350.000,00 dan belanja bantuan kepada partai politik sebesar Rp. 1.006.145.720,00.

- *Belanja Tidak Terduga*, pada tahun 2020 direncanakan sebesar **Rp.4.000.000.000,00.** Penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang.

Lebih jelasnya plafon anggaran sementara Belanja Tidak Langsung TA. 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.
Plafon Anggaran Sementara **Belanja Tidak Langsung**
Tahun Anggaran 2020

NO	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TA. 2020	KET.
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**614.716.212.377,87**	
I	**Belanja Pegawai**	**545.281.282.807,87**	
II	**Belanja Hibah**	**56.746.690.000,00**	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00	
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	49.983.690.000,00	
3	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	5.835.000.000,00	
4	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	728.000.000,00	
III	**Belanja Bantuan Sosial**	**6.330.743.850,00**	
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.459.383.850,00	
2	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi	2.061.360.000,00	
3	Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan	810.000.000,00	
IV	**Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**2.357.495.720,00**	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi NTB	1.351.350.000,00	
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.006.145.720,00	
IV	**Belanja Tidak Terduga**	**4.000.000.000,00**	
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	

BAB 5

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pembiayaan Daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Fungsi Pembiayaan Daerah pada dasarnya adalah untuk menutup atau menyeimbangkan struktur APBD apabila diprediksi defisit. Rencana pembiayaan daerah terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD dalam keadaan surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dalam PPAS TA. 2020, Pembiayaan Daerah direncanakan mengalami peningkatan sebesar **Rp. 93,502,290,462.87** atau sebesar 303,54 persen dari target Pembiayaan Daerah TA. 2019 sebesar Rp.30.803.444.560,25 sehingga menjadi sebesar Rp. 124.305.735.023,12.

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

Dalam PPAS Kota Mataram TA. 2020, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan meningkat sebesar 220,90 persen atau sebesar Rp.92.106.695.103,87 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.696.539.919,25 menjadi sebesar Rp.133.803.235.023,12. Adapun komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

- SILPA direncanakan mengalami penurunan sebesar 62,10 persen atau menurun sebesar Rp.25.893.304.896,13 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.41.696.539.919,25 menjadi sebesar Rp.15.803.235.023,12;
- Penerimaan Pinjaman Daerah yang direncanakan mengalami peningkatan sebesar 100% atau meningkat sebesar Rp.118.000.000.000,00 dari tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS TA. 2020 yang bersumber dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, direncanakan mengalami penurunan target sebesar 12.81 persen atau menurun sebesar Rp. 1.395.595.359,00 dari target TA. 2019 sebesar Rp. 10.893.095.359,00 menjadi sebesar Rp. 9.497.500.000,00. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota Mataram pada TA. 2020 direncanakan kepada: i). PDAM Giri Menang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00; ii) PT. Bank NTB Mataram direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00; dan iii) PT. BPR NTB direncanakan sebesar Rp. 497,500,000.00

Plafon anggaran sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2020 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.1.

Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Kota Mataram TA. 2020

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA		+/-	%
		2019	2020		
III	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**30.803.444.560,25**	**124.305.735.023,12**	**93.502.290.462,87**	**303,54**
3.1	**PENERIMAAAN PEMBIAYAAN**	**41.696.539.919,25**	**133.803.235.023,12**	**92.106.695.103,87**	**220,90**
3.1.1	SILPA TA. sebelumnya	41.696.539.919,25	15.803.235.023,12	(25.893.304.896,13)	(62,10)
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	118.000.000.000,00	118.000.000.000,00	100,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.893.095.359,00**	**9.497.500.000,00**	**(1.395.595.359,00)**	**(12,81)**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	- PT. BPR NTB Mataram	497.500.000,00	497.500.000,00	-	-
	- PDAM Giri Menang	6.395.595.359,00	5.000.000.000,00	(1.395.595.359,00)	(21,82)
	- PT. Bank NTB	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-

BAB 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Mataram TA. 2020 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan / perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 19 November 2020

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH